

## PENGUKURAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN KOTA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF *VALUE FOR MONEY*

Ayu Citra Ningsih Widjanarko  
Ayucitrawidjanarko@gmail.com  
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to measure, analyze, and to know the performance at Public Works Department of Bina Marga and City water channel of Surabaya as measured from Government Performance Accountability Performance Report (LAKIP) at the year of 2015 and 2016 based on Value For Money perspective. The research method using descriptive qualitative, with data source in the form of secondary data and primary data. Data collection techniques used interviews and documentation. The results of this research indicates that the Public Works Department of Bina Marga and City water channel of Surabaya in running E-Performance has been effective, causing processing time or time effectiveness, the cost efficiency of the Agency performance is increasing, in terms of economy that refers to the budget (input) with budget realizations. Measurement of efficiency can be seen from the amount of output realized to the input. While the measurement of effectiveness can be seen from the output and outcome are considered successful based on the purpose of agencies in implementing programs and activities, using economic measures, efficient and effective. Although performance reports have shown that economic performance, efficiency and effectiveness are as expected, it is necessary to develop relevant performance measurement models, taking into account the relevance of program objectives and activities.*

*Keywords: Value For Money, E-Performance, economy, efficiency, effectiveness.*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur, menganalisis, serta mengetahui kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya yang diukur dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2015 dan 2016 berdasarkan perspektif *Value For Money*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sumber data berupa data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya dalam menjalankan *E-Performance* sudah efektif yang menyebabkan waktu pemrosesan atau efektivitas waktu, efisiensi biaya dari kinerja Dinas semakin meningkat, dalam segi ekonomi yang mengacu pada anggaran (*input*) dengan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi terlihat dari jumlah realisasi *output* yang dihasilkan terhadap *input*. Sedangkan pengukuran efektivitas dapat dilihat dari *output* maupun *outcome* yang dinilai berhasil berdasarkan tujuan instansi dalam melaksanakan program dan kegiatan, dengan menggunakan ukuran ekonomi, efisien, dan efektif. Meskipun dengan laporan kinerja sudah menunjukkan capaian kinerja ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan yang diharapkan, namun demikian diperlukan pengembangan model pengukuran kinerja yang relevan, dengan mempertimbangkan relevansinya tujuan program dan kegiatan.

Kata kunci: *Value For Money, E-Performance*, ekonomi, efisiensi, efektivitas.

### PENDAHULUAN

Menurut Mardiasmo (2009:121) Pengukuran kinerja adalah faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Selain anggaran sektor publik, Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja sektor

publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Organisasi sektor publik menyediakan berbagai layanan kepada masyarakat baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, penegak hukum, transportasi, publik, dan jasa lainnya.

Sektor publik sering dinilai tidak produktif, tidak efisien, sumber kebocoran dana, rendah kualitas, miskin inovasi serta kreativitas, dan instansi yang selalu merugikan dan berbagai kritikan lainnya. Munculnya kritik keras yang ditujukan kepada organisasi sektor publik tersebut kemudian muncul gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik.

Kemudian organisasi ini juga harus mampu menghasilkan barang atau layanan publik yang efisien, dengan maksud agar pelayanan yang selama ini masih mengandalkan "tip" dari masyarakat dapat berubah, dan dapat menghasilkan pegawai negeri yang berkualitas serta sarat akan fungsi (Sugandi, 2011:41)

Keberhasilan suatu instansi pemerintah harus memperhatikan seluruh aktivitas yang diukur, tidak semata-mata kepada *input* dari program instansi, akan tetapi juga lebih ditekankan pada *output*, proses, manfaat, dan dampak dari program instansi tersebut bagi kelangsungan hidup masyarakat. Pengukuran kinerja pada keberhasilan suatu instansi pemerintah, akan lebih diperhatikan dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah disampaikan dalam perencanaan strategis.

Beberapa instansi pemerintahan telah menggunakan model pengukuran kinerja dengan menggunakan perspektif *Value For Money*. Hal ini sesuai dengan penelitian Nada (2016) yang menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya pada Tahun 2015 dinilai lebih ekonomis atau lebih hemat. Hal ini berdasarkan perbandingan realisasi pengeluaran dan anggaran pengeluaran, Walaupun dalam perhitungan menurut *Value For Money* tahun 2014 lebih ekonomis, akan tetapi pada realisasinya tahun 2015 lebih hemat, hal ini dikarenakan besarnya penganggaran pada tahun 2014 sehingga banyak dana yang dikembalikan ke Pemerintahan Kota Surabaya. Hasil Pengukuran ditinjau dari tingkat efisiensinya menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya selama tahun 2014 dan 2015 dapat dinilai relatif efisien. Walaupun terdapat perbedaan pada kegiatan di tahun 2014 dan 2015, hal ini tidak menjadi hambatan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya untuk mencapai tingkat efisiensi. Tingkat efisiensi diukur berdasarkan perbandingan antara output terhadap input, dimana target dan anggaran untuk setiap kegiatan digunakan secara efisien dan mampu menjalankan kegiatan sesuai dengan target yang direncanakan. Hasil pengukuran kinerja ditinjau dari tingkat efektivitasnya menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya pada tahun 2014 dan 2015 dinilai efektif. Hal ini diukur berdasarkan hasil-hasil yang dicapai output maupun outcome. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya telah dapat menjalankan tujuan organisasi, dimana rencana dalam penyusunan program dan kegiatan operasi organisasi sektor publik untuk mencapai tujuan organisasi dapat direalisasikan sesuai dengan target yang diharapkan.

Dari hasil penelitian diatas dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian ini. Dengan memperhatikan kinerja instansi pemerintah yang sering menjadi sorotan, maka penulis tertarik untuk mengemukakan masalah dalam mengukur kinerja unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya menggunakan perspektif *Value For Money*. Semua masalah ini yang menjadi latar belakang penulisan skripsi, sehingga

penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya dalam Perspektif *Value For Money?*"

## TINJAUAN TEORITIS

### Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik di Indonesia adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat seperti: organisasi pemerintah pusat, organisasi pemerintah daerah, organisasi parpol dan LSM, organisasi yayasan, organisasi pendidikan dan kesehatan, organisasi tempat peribadatan (Bastian, 2006:3).

Menurut Mahmudi (2011:2) organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan konstitusi negara. Sementara itu organisasi sektor sosial merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan tetap diselenggarakan oleh masyarakat baik secara individual maupun bersama-sama, dan tidak di bawah organisasi pemerintahan.

Menurut Mahsun (2011:14) organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan. Tetapi, berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, sumber daya ekonomi organisasi sektor publik di kelola tidak untuk mencari laba (nirlaba)

### Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Menurut Perpres No 29 tahun 2014 indikator kinerja ialah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Menurut Mahmudi (2011:12) Kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertrson, 2002 dalam Mahsun, 2011:141).

### Tujuan Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009:122) secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah: 1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*). 2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi. 3) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan

manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*, dan Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Sedangkan tujuan dilakukan pengukuran kinerja di sektor publik menurut Mahmudi (2011:14) adalah: 1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. 2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. 3) Memperbaiki kinerja periode berikutnya. 4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishmen*. 5) Memotivasi pegawai. 6) Menciptakan akuntabilitas pegawai.

### **Manfaat Pengukuran Sektor Publik**

Manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik (BPKP, 2000 dalam Mahsun, 2011:33) : 1) Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja. 2) Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati. 3) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja. 4) Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan skema indikator kinerja yang telah disepakati. 5) Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi. 6) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif. 9) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan. 10) Mengungkap permasalahan yang terjadi.

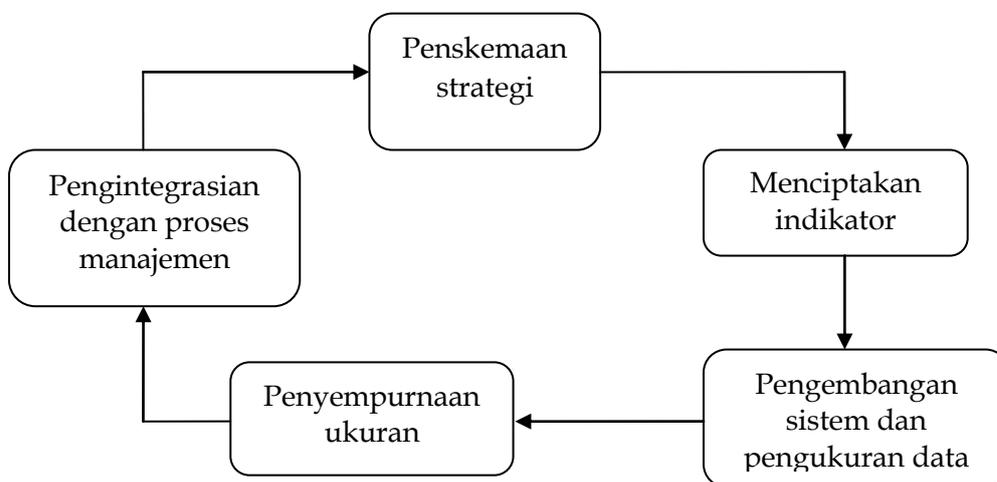
### **Elemen Pokok Pengukuran Kinerja Sektor Publik**

Menurut Mahsun (2011:142) bahwa terdapat elemen-elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain: 1) Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi. Tujuan adalah pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas 2) Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal - hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi - indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. 3) Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran - sasaran organisasi. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan negatif, atau penyimpangan nol. 4) Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. 5) *Feedback*. Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. 6) Penilaian kemajuan organisasi. Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai organisasi. Kriteria yang digunakan untuk menilai kemajuan organisasi ini adalah tujuan yang telah ditetapkan. 7) Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja menghasilkan organisasi yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen maupun *stakeholders*. Keputusan-keputusan yang bersifat ekonomis dan strategis sangat membutuhkan dukungan informasi kinerja ini.

### **Siklus Pengukuran Kinerja**

Terdapat lima tahap untuk melakukan pengukuran kinerja, yaitu penskemaan strategi, penciptaan indikator, pengembangan sistem pengukuran data, penyempurnaan ukuran kinerja, dan pengintegrasian dengan proses manajemen. Yang pertama, perencanaan strategis.

pengukuran kinerja dimulai dengan proses penskemaan strategik, yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program operasional, dan kegiatan/aktivitas. Kedua, penciptaan indikator kinerja. Instansi pemerintah perlu memulai menyusun dan menetapkan ukuran/ indikator kinerja. Ada beberapa aktivitas dari beberapa jenis program yang dilaksanakan dalam proses ini, dimana indikator kinerja berupa *input*, *process*, *output*, *outcomes*, *benefit*, atau *impacts*. Ketiga, mengembangkan sistem pengukuran kinerja. pada tahap ini pertama, meyakinkan keberadaan data yang diperlukan dalam siklus pengukuran kinerja. Kedua, mengukur kinerja dengan data yang tersedia dan data yang dikumpulkan. Terakhir penggunaan data pengukuran kinerja yang dihimpun, harus dipresentasikan dalam cara-cara yang dapat dimengerti dan bermanfaat. Keempat, penyempurnaan ukuran. Pemikiran kembali atas indikator hasil (*outcome*) dan indikator dampak (*impacts*) menjadi lebih penting dibandingkan pemikiran kembali lebih penting dibandingkan pemikiran kembali atas indikator masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Dan yang kelima, pengintegrasian dengan proses manajemen. Bagaimana menggunakan ukuran kinerja tersedia secara efektif merupakan tantangan selanjutnya. Penggunaan data organisasi dapat dapat dijadikan alat untuk memotivasi tindakan dalam organisasi.



Sumber: Bastian (2006:281)

Gambar 1

Siklus pengukuran kinerja

### Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Bastian (2006:267). Yang menjelaskan bahwa: a) Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. b) Indikator keluaran (*output*) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik. c) Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). d) Indikator manfaat (*benefits*) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. e) Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan (LAN dan BPKP, 2000).

### Karakteristik Indikator Kinerja yang Baik

Beberapa syarat indikator kinerja yang baik menurut Mahmudi (2011:149) antara lain : a) Konsistensi (*Consistency*). b) Dapat diperbandingkan (*Comparability*). c) Jelas (*Clarity*). d) Dapat dikontrol (*Controllability*). e) Kontinjensi (*Contingency*). f) Komprehensif (*Comprehensiveness*). g) Fokus (*Boundedness*). h) Relevan (*Relevance*). i) Realistis (*Feasibility*).

### Langkah - Langkah Penyusunan Indikator Kinerja

LAN dan BPKP (2000) terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun dan menetapkan indikator kinerja dalam kaitannya dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut: a) Susun dan tetapkan rencana strategis lebih dahulu (visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program dan anggaran). b) Identifikasi data atau informasi yang dapat dijadikan atau dikembangkan menjadi indikator kinerja. c) Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan atau program atau kegiatan.

### Penilaian Kinerja *Value For Money*

Menurut Mardiasmo (2009:127) *Value For Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Menurut Konsep *Value For Money* terdiri atas tiga elemen utama, yaitu:

Menurut Mahmudi (2011:59) Ekonomi terkait dengan penggunaan input primer berupa anggaran atau kas menjadi input reguler berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk pelaksanaan kegiatan operasional organisasi. Menurut Mardiasmo(2009: 133) Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan (*input*) yang digunakan.

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Ketentuan:

Jika < 100% berarti ekonomis

Jika > 100% berarti tidak ekonomis

Jika = 100% berarti ekonomis berimbang

Menurut Mahmudi (2011:59) Efisiensi merupakan hubungan antara output berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output per unit input*. Menurut Mardiasmo (2009:133) suatu kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana serendah-rendahnya (*spending well*).

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Input}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika < 100% berarti efisien

Jika > 100% berarti tidak efisien

Jika = 100% berarti efisien berimbang

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Dari uraian ketiga elemen tersebut, dapat disimpulkan bahwa: ekonomi terkait dengan *input*, efisiensi terkait dengan *input* dan *output*, dan efektivitas terkait dengan *output* dan tujuan.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan :

Jika > 100% berarti efektif

Jika < 100% berarti tidak efektif

Jika = 100% berarti efektifitas berimbang

### Langkah-Langkah Perencanaan dan Pengukuran Kinerja *Value For Money*

Menurut Mahmudi (2011: 93) langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat perencanaan dan pengukuran kinerja *Value For Money* terdiri atas empat tahap, yaitu: a) Penentuan misi, visi, dan tujuan (*goal*), serta strategi. b) Penerjemahan misi, visi, dan tujuan (*goal*), serta strategi ke dalam. c) Penyusunan program. d) Penyusunan anggaran.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendiskripsikan konsep *Value For Money* dalam mengukur kinerja instansi pemerintah. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi.

Teknik pengolahan datanya menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang didasari oleh teori-teori yang mendukung penelitian dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan juga berfungsi sebagai penjelasan atas analisis data tersebut. Sedangkan obyek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah organisasi yang sifatnya tidak mencari keuntungan dan dibutuhkan banyak orang yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya.

### Objek Penelitian

Laporan Kinerja menurut PP No. 8 tahun 2006 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN yang diimplementasikan dalam APBN. Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelaporan dana tau entitas ekonomi.

Akuntabilitas kinerja disajikan dalam satu bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau sering disebut dengan LAKIP. LAKIP adalah media akuntabilitas yang dapat dipergunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban untuk menjawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

### Teknik Pengumpulan Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder sendiri menurut Indriantoro dan Supomo (2002 : 147) merupakan

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, yaitu dengan observasi langsung dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 1) data primer, untuk mengetahui gambaran umum pada objek penelitian serta situasi, kondisi, dan juga permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan survey pendahuluan atau kunjungan awal pada objek penelitian. 2) survei lapangan, untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, peneliti melakukan tinjauan langsung pada objek penelitian. Pengumpulan data melalui beberapa cara, seperti: a) wawancara, merupakan penggunaan teknik pengumpulan data dalam metode survey dengan menggunakan teknik tanya jawab secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan subjek penelitian. b) Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa langsung pada dokumen, catatan tertulis, arsip-arsip, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 2) data sekunder, adalah data yang diperoleh dari Sumber selain responden yang menjadi sasaran penelitian. Peneliti mengambil berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu cara atau teknik pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang lengkap dan benar untuk memperoleh penjelasan atau uraian mengenai sifat (karakteristik) obyek dari data-data tersebut. Langkah-langkah dalam proses analisis data adalah sebagai berikut: Mengumpulkan dan mengidentifikasi data-data penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya seperti gambaran umum, visi dan misi organisasi/badan, serta kegiatan operasional manajerial dan program kerja maupun target yang hendak dicapai, Menganalisa efisiensi dan efektivitas kinerja menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya. Mendeskripsikan data penelitian yang terkait dengan materi kajian penelitian, Analisis dan pembahasan evaluasi pelaporan kinerja dan penilaian kinerja instansi pemerintah deskripsi data dan berlandaskan teori yang relevan, memberikan simpulan berdasarkan hasil dan analisis pembahasan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi *E-Performance* pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya**

*E-Performance* adalah sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka penilaian prestasi kinerja pegawai yang lebih objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan, sehingga terwujud manajemen pegawai berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Aplikasi *e-performance* ini dirancang sesuai dengan Peraturan Walikota No. 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada Belanja Langsung kepada PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Menurut penelitian Wimastuti (2016) Keberadaan *E-Performance* juga mampu menjadi stimulus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait, sebab penghitungan poin murni dilakukan oleh komputer sehingga tidak ada kompromi didalamnya, dan hal seperti inilah yang akan membuat pegawai untuk terbiasa kerja secara disiplin dan memberikan kinerja terbaik mereka, sehingga tidak akan ada lagi yang namanya. Penilaian-penilaian tersebut sesuai

dengan 7 indikator efektivitas yang telah ditetapkan peneliti menurut pandangan gibson, 7 indikator tersebut adalah: 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan. 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap. 4) Perencanaan yang matang. 5) Penyusunan program yang tepat. 6) Tersedianya sarana dan prasarana. 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Dapat disimpulkan bahwa keefektifitasan program tersebut di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya dapat dikatakan sudah efektif karena dari tujuh indikator yang ditetapkan oleh peneliti Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya telah memenuhi semua indikator yaitu, yang pertama kejelasan tujuan yang ingin dicapai dirasa sudah sesuai dengan yang diinginkan karena tujuan yang diinginkan adalah menjadikan kinerja para pegawai dinas ini lebih meningkat sudah hal itu sudah sangat dipahami oleh para pegawai. Yang kedua kejelasan strategi yang digunakan sudah sangat jelas karena sesuai dengan Undang-Undang dan SK walikota yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja para pegawainya. Yang ketiga dan keempat, proses analisis dan perumusan kebijakan dan penyusunan program yang tepat hal ini di buktikan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan program tersebut sehingga para pegawai mudah untuk beradaptasi dengan program yang sudah ada. Yang kelima adalah perencanaan yang matang hal ini dibuktikan dengan adanya jangka waktu yang cukup untuk merealisasikan program ini dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh pegawai. Yang keenam, sarana dan prasarana yang dirasa sudah sangat baik hal ini dibuktikan dengan tersedianya komputer bagi masing-masing pegawai sehingga membantu berjalannya aktivitas pegawai agar lebih maksimal dan tidak perlu meminjam komputer ke dinas lain atau ke teman se-dinas. serta yang terakhir adalah sistem pengawasan dan pengendalian sudah sangat efektif karena setiap pegawai menginput data yang sudah tersistem dan bagian kepala yang mengawasi atau mengontrol secara berkala.

### **Hubungan *E-Performance* dengan *Value For Money* Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya berdasarkan perspektif *Value For Money* dengan meninjau dari segi efisien, efektivitas, dan ekonomis bahwa ketiga pokok penilaian tersebut berhubungan satu sama lain untuk membantu organisasi sektor publik mencapai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Ekonomis membahas mengenai masukan (*input*), efisiensi membahas masukan (*input*) dan keluaran (*output*), dan efektivitas mengenai keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*). Oleh karena itu hubungan antara *E-Performance* dengan *Value For Money* adalah karena seluruh input data sudah dilaksanakan dengan aplikasi yang bersifat *online*, itu yang menyebabkan waktu pemrosesan atau efektivitas waktu, efisiensi biaya dari kinerja Dinas semakin meningkat. Pengaplikasian *E-Performance* dapat terlihat pada hasil-hasil yang di tetapkan pada indikator kinerja yang oleh Dinas.

### **Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Ditinjau dari Segi Ekonomi**

Berdasarkan capaian kinerja yang tertuang pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas pekerjaan umum bina marga dan pematusan kota Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, target anggaran serta realisasi anggaran yang dicapai adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2015 - 2016**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Total (Rp)
2015	1.383.536.230.067	1.109.569.114.187	35.812.285.683	1.145.381.399.870
2016	1.306.617.862.728	1.033.720.429.361	42.475.984.007	1.076.196.413.368

Sumber : Lakip 2014 dan Lakip 2015 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pada tahun 2015 anggaran yang disetujui sebesar Rp 1.383.536.230.067 pada tahun 2016 Rp 1.306.617.862.728. sedangkan realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp 1.145.381.399.870 yang terdiri dari belanja langsung Rp 1.109.569.114.187 dan belanja tidak langsung 35.812.285.683 lalu realiasi pada tahun 2016 Rp 1.076.196.413.368 yang terdiri dari belanja langsung Rp 1.033.720.429.361 dan belanja tidak langsung 42.475.984.007.

Sehingga dari table diatas pengukuran ekonomis untuk tahun 2015 sampai dengan 2016 dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2015} = \frac{1.145.381.399.87}{1.383.536.230.067} = 82,78\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{1.076.196.413.368}{1.306.617.862.728} = 82,38\%$$

Pada hal ini anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya tahun 2016 lebih kecil daripada tahun 2015. Karena mengalami penurunan anggaran terjadi penurunan dalam perhitungan prosentase yaitu dimana pada tahun 2015 adalah 82,78% dan di 2016 mengalami penurunan yaitu 82,36% walaupun tidak signifikan. Menurut Bapak Arief pada Sub Bagian Penyusunan Program :

“berkurangnya jumlah anggaran pada tahun 2016 itu di karenakan sudah tercapainya suatu target melebihi yang ditetapkan, maka dari itu di tahun 2016 memang ada penurunan anggaran di banding 2015”.

Pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya telah mencapai tingkat ekonomis ini terlihat pada table 5, yaitu anggaran yang disetujui Rp 1.383.536.230.067 dan realisasinya sebesar Rp 1.145.381.399.870 sedangkan pada tahun 2016 anggaran yang disetujui senilai Rp 1.306.617.862.728 dan penyerapan atas anggaran tersebut mencapai Rp 1.076.196.413.368 ini memperlihatkan bahwa mereka sudah menjalankan kegiatan dan operasionalnya seekonomis dan sehemat mungkin, karena dapat dilihat dari jumlah penyerapan atau realisasi lebih kecil dari jumlah anggaran yang disetujui. Menurut Bapak Arief pada Sub Bagian Penyusunan Program :

“Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan ini lebih memilih dalam pembelanjaan kebutuhan untuk operasional dilihat dari jangka waktu dapat dipakainya, jadi lebih memilih barang yang sedikit mahal tetapi jangka waktu depresiasinya panjang daripada murah tapi jangka waktunya pendek dari situ juga dapat menghemat anggaran”.

Ditambahkan oleh Bapak Diki pada Sub Bagian Keuangan :

“Seluruh pembelanjaan kebutuhan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan sudah terstandar oleh bina program dari pusat, jadi setiap pembelanjaan tidak boleh melebihi dari standar, tetapi kalau lebih rendah tidak apa-apa”.

Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran yang digunakan untuk memperoleh sumber daya (*input*) dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Dimana, dengan sumber daya (*input*) yang diperoleh diharapkan mampu menghasilkan realisasi (*output*) yang maksimal dan sesuai yang ditetapkan.

### **Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya Ditinjau dari Segi Efisien**

Di tahun 2015 dari kegiatan yang telah dilaksanakan, telah menyerap anggaran sebesar Rp 1.109.569.114.187,- dari dana anggaran sebesar Rp1.347.138.613.315,- atau sebesar 82,36% dari dana anggaran yang tersedia dan dapat dikatakan cukup efisien. Sedangkan di tahun 2016 dari kegiatan yang telah dilaksanakan, telah menyerap anggaran sebesar Rp 1.033.720.429.361,- dari anggaran yang disediakan sebesar 1.263.554.073.591,- atau sebesar 81,81% dari dana yang tersedia dan dapat dikatakan cukup efisien. Menurut Bapak Didi Sub Bagian Keuangan :

“Sudah pasti efisien, misalnya ada pekerjaan kriterianya sudah ditentukan lalu di lempar ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) untuk di lelang, kalau di lelang pasti kan pasti penawaran terendah. Dan juga secara sistem semuanya sudah tersistem maka dari itu sudah efisien”.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*) dikali 100% untuk menghasilkan presentase pencapaian dari program yang telah dilaksanakan, pengukuran ini berdasarkan konsep *value for money*. Suatu organisasi, program, atau dapat kegiatan dikatakan efisien apabila menghasilkan output tertentu dengan input serendah rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar besarnya.

Pengukuran efisiensi tahun 2015 dan 2016, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 dan 2016 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya secara keseluruhan dapat dikatakan efisien. Dari pencapaian atau jumlah realisasi dari indikator keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam mewujudkan kegiatan operasional terhadap indikator masukan (*input*) yang digunakan dalam anggaran. Namun, dapat dilihat juga ada beberapa kegiatan di tahun 2015 dan 2016 yang di bawah 50% yaitu kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum) ditahun 2015 hanya mencapai 16,49% dan di 2016 dana tersebut tidak diserap sama sekali, karena kegiatan tersebut bukan tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan, namun dari pemerintah pusat disediakan dana tersebut. Dan juga sama dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemabangunan jaringan air bersih yaitu di tahun 2015 hanya mencapai 37,50% dari yang dianggarkan dan di tahun 2016 dana tersebut tidak diserap. Jika tidak ada pembangunan jaringan air bersih maka monitoring juga ditiadakan kedua kegiatan tersebut saling berkesinambungan. Selain kedua kegiatan tersebut di tahun 2015 ada kegiatan penunjang kegiatan PNPM mandiri perkotaan karena di lapangan program tersebut tergantung dengan permintaan, jika permintaannya sedikit maka yang dana yang dikeluarkan akan sedikit pula. Untuk di tahun 2016 ada kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana permukiman yang hanya mencapai 44,74% dalam penyerapan anggaran, dikarenakan masih proses dilapangan, sehingga belum bisa terealisasi dan kegiatan tersebut adalah proyek hasil jaring aspirasi (Jasmas) dan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan tersebut.

## Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Ditinjau dari Segi Efektivitas

Berikut adalah tabel pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya tahun 2015 sampai dengan 2016 ditinjau dari efektivitas :

**Tabel 2**  
**Pengukuran Efektivitas Tahun 2015**

Sasaran	Indikator Kinerja Program	Capaian	Keterangan
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota	1. Luas wilayah genangan	137,32%	Tercapai
	2. Rata-rata lama terjadi genangan	111,03%	Tercapai
	3. Rata- rata tinggi genangan yang terjadi	118,00%	Tercapai
	4. Lama jam sibuk	100,00%	Tercapai
	5. Kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman	103,53%	Tercapai

Sumber : LAKIP 2015 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Analisis ini meliputi uraian berkaitan pencapaian kinerja kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya di tahun 2015 dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini pencapaian kinerja kebijakan dapat dirinci sebagai berikut: 1) Luas Wilayah Genangan: Dapat dilihat dilihat capaian kinerja tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya untuk sasaran meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota dari Indikator Kinerja Luas wilayah genangan yang ditargetkan adalah 100% atau 2027 Ha namun realisasinya adalah 137,55% atau 1027,55 Ha termasuk katogeri yang sangat baik atau sangat efektif itu di tandai dari semakin kecilnya luas genangan yang ada di Kota Surabaya pada saat musim hujan. Pada kegiatan ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya menyediakan Sistem Drainase dengan dukungan rumah pompa dan mechanical screen yang ada saat ini mampu mengurangi luas wilayah genangan. 2) Rata-rata Lama Terjadinya Genangan: Capaian Kinerja tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya pada Indikator Kinerja Program ini adalah sebesar 111,03% atau 53,38 menit dari target 100% atau 60 menit termasuk kategori yang sangat baik atau sangat efektif. Untuk mendukung kegiatan penanganan bajir di Kota Surabaya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya melaksanakan pengerukan saluran untuk mengebalikan dan menjaga kapasitas saluran air agar mampu menampung debit bajir dan juga melakukan sosialisasi secara intensif kepada warga agar tidak membuang sampah di sungai. 3) Rata-rata Tinggi Genangan: Realisasi pada tahun 2015 menunjukkan indicator kinerja rata-rata tinggi genangan yang terjadi telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian penurunan rata-rata tinggi genangan yang ditargetkan adalah 100% atau 20cm sedangkan realisasinya adalah sebesar 118% atau 16,40cm dari capaian ini termasuk kategori sangat baik atau sangat efektif. Yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemtausan untuk mencapai target adalah pembangunan penambahan waduk di daerah hulu dan hilir , optimalisasi pintu air, meningkatkan jumlah rumah pompa baru dan pembangunan saluran baru. 4) capaian indikator kinerja lama jam sibuk adalah sebesar 6 jam 22 menit atau 100% dari target yang ditetapkan 6 jam 22 menit 100%. Capaian indikator kinerja lama jam sibuk lebih tinggi dari capaian tahun 2014. Ut nuk terus mengurangi lama jam sibuk agar kemacetan terus berkurang yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya adalah pembangunan pedestrian ut nuk mengurangi

hambatan samping kanan/kiri jalan, mengoptimalkan pembangunan jembatan dan frontage, memperbaiki jalanan yang rusak, dan menambah saluran tepi agar kondisi jalan tetap baik. 5) Kawasan Kumuh yang Mendapat Peningkatan Layanan Prasarana Pemukiman: Capaian indikator kinerja peningkatan layanan prasarana pemukiman adalah 440 lokasi atau 103,53% dari target yang ditetapkan adalah 425 lokasi atau 100%. Untuk capaian kinerja indikator kawasan kumuh yang mendapatkan peningkatan layanan prasarana pemukiman mengacu pada Program Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman yang meliputi Kegiatan Pavingisasi.

**Tabel 3**  
**Pengukuran Efektivitas Tahun 2016**

No	Sasaran	Indikator	Capaian	Keterangan
1	Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum	Luas tanah dan /atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	56,90%	Tercapai, tetapi masih adanya proses di lapangan, sehingga belum bisa dilakukan pembayaran ganti rugi
2	Meningkatkan sarana prasarana drainase perkotaan yang memadai	Luas wilayah genangan	63,36 %	Tercapai, tetapi tahun 2016 memiliki curah hujan dua kali lebih tinggi daripada tahun 2015
3	Meningkatkan jaringan jalan yang terpadu	Penambahan jalan baru	238,2%	Tercapai
		Jalan dalam kondisi baik	103,85%	Tercapai
		Penyediaan prasarana pejalan kaki	742,89%	Tercapai
4	Meningkatkan penyediaan sarana prasarana lingkungan perumahan dan kawasan pemukiman layak huni	Luas peningkatan kualitas lingkungan perumahan pemukiman layak huni dengan kelengkapan sarana prasarana dan sistem sanitasi yang berkelanjutan	100%	Tercapai

Sumber: LAKIP 2016 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Sedangkan ini adalah uraian pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya tahun 2016, dalam analisis ini pencapaian kinerja kebijakan dapat dirinci sebagai berikut :1) Akumulasi Luas Tanah dan/atau Bangunan yang Disediakan Bagi Pembangunan Infrastruktur Untuk Kepentingan Umum: Indikator akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur mendukung sasaran bagi terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Pada tahun 2016 realisasi luas tanah yang telah berhasil dibebaskan untuk kepentingan umum adalah seluas 1.7563 Ha atau hanya 56,90%. Dari 17 lokasi kegiatan pengadaan tanah yang direncanakan, ada 4 lokasi yang tidak ada realisasi, yaitu Pengadaan tanah type B Jalan Lingkar Luar Barat, Pengadaan tanah type B Jalan Lingkar Luar Timur, Pengadaan tanah type C Manukan Wonorejo, dan Pengadaan tanah type C Tanggul Kali Lamong Saluran Dukuh Gendong. Hal tersebut dikarenakan masih proses di lapangan, sehingga belum bisa dilakukan pembayaran ganti rugi. Menurut Bu Vivi Sub Bagian Penyusunan Program : “Program ini termasuk program kerja sama dengan Instansi lain, jadi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan sudah mencapai target namun di instansi lain tidak mencapai target maka jika di akumulasikan hanya sejumlah yang ada di data”. 2) Tingkat Genangan: Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai tingkat genangan pada tahun 2016

adalah hanya sebesar 63,36%. Analisa dari tidak tercapainya target tingkat genangan adalah dikarenakan tingkat curah hujan pada tahun 2016 yang sangat tinggi. Berdasarkan hasil pantauan hujan, maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 memiliki curah hujan dua kali lebih tinggi daripada tahun 2015 dapat dilihat di lampiran 4. Namun selain permasalahan alam yang dihadapi, kendala lain juga memiliki pengaruh besar terhadap capaian target. 3) Penambahan Jalan Baru: Indikator kinerja penambahan jalan baru mendukung tercapainya sasaran peningkatan jaringan jalan yang terpadu. Pada tahun 2016 bahwa capaian indikator penambahan jalan baru adalah sebesar 238,2%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian dari indikator penambahan jalan baru melampaui target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan proses yang berjalan tidak mengalami hambatan yang berarti. Proses pembangunan yang diawali dengan studi kelayakan, perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) dan pengadaan tanah dilakukan sesuai jadwal dan didukung oleh tersedianya anggaran. 4) Jalan Dalam Kondisi Baik: ndikator jalan dalam kondisi baik pada tahun 2016 realisasi yang dicapai adalah sebesar 103,85%, hal ini berarti bahwa capaian telah melampaui target. Adapun hasil tersebut dipengaruhi oleh proses kegiatan pemeliharaan jalan yang rutin dan terjadwal dengan baik. Koordinasi yang baik dari sumber daya manusia yang ada, didukung pula oleh jumlah sarana prasarana yang memadai mempengaruhi jalannya pelaksanaan pemeliharaan. 5) Penyediaan Prasarana Pejalan Kaki: Realisasi dari indikator persentase penyediaan prasarana pejalan kaki tahun 2016 adalah sebesar 28,23%, dan capaiannya adalah sebesar 742,89%. Hal ini berarti bahwa capaian telah jauh melampaui target yang diharapkan. Adapun hasil tersebut dipengaruhi oleh proses kegiatan pembangunan pedestrian yang tidak mengalami kendala berarti. 6) Luas Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Permukiman Layak Huni dengan Kelengkapan Sarana Prasarana dan Sistem Sanitasi secara Berkelanjutan: Indikator luas kawasan perumahan permukiman yang mendapatkan peningkatan layanan sarana prasarana tahun 2016 memiliki target 591,51 Ha atau 31 Kecamatan dan capaian realisasinya adalah 100% atau 591,51 Ha atau 31 Kecamatan . Target tersebut merupakan luas kawasan perumahan permukiman yang mendapatkan layanan sarana prasarana berupa pavingisasi.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Menurut hasil analisis dan pembahasan tentang Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya dalam Perspektif *Value For Money*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Model Pengukuran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya dilakukan secara sistematis melalui program *E-performance*, dimana sistem ini menurut penuturan dari Kepala Sub. Bagian Penyusunan Program adalah sistem yang telah dibakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pengukuran kinerja menggunakan sistem *E-performance* dilaksanakan dengan baik, dalam melaksanakan kegiatannya, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan mengupayakan tidak terjadi pemborosan. 2) Pada tahun 2015 dan tahun 2016 hasil pengukuran kinerja ditinjau dari segi ekonomisnya menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja di katakana secara umum ekonomis atau hemat. 3) Hasil Pengukuran ditinjau dari tingkat efisiensinya menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya selama tahun tahun 2015 dan 2016 dapat dinilai relatif efisien. 4) Ditinjau dari tingkat efektivitasnya menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya pada tahun 2015 dan 2016 dinilai efektif. Hal ini diukur berdasarkan hasil-hasil yang dicapai *output* maupun *outcome*.

### Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya untuk tahun-tahun selanjutnya, agar tercipta *good govermance* dan sukses dalam membangun Kota Surabaya yang lebih sejahtera. 2) Dalam penyusunan LAKIP sebaiknya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya menyajikan perolehan hasil (*outcome*) dari kinerja selama tahun berjalan, agar pembaca dapat mengerti dan memahami serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dengan membandingkan kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya. 3) Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian selanjutnya diharapkan dalam penentuan *outcome* dapat menggunakan metode lain, misalkan menyebar angket kepada masyarakat agar diketahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan suatu organisasi, sehingga nilai *outcome* lebih riil.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Indriantoro, N. dan Supomo 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk akuntansi dan manajemen*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- LAN dan BPKP. 2000. *Modul Sosialisasi Sistem akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah*. Cetakan pertama. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Mahmudi. 2011. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. UPP STIMYKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, M. 2011. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga. Yogyakarta.
- Nada, S. L. 2016. *Pengukuran Kinerja Unit Kerja Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Value For Money*. Skripsi. Program S1 Akuntansi Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 21 April 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80. Jakarta.
- Sugandi, Y. S. 2011. *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Wimastuti, N. 2016. *Efektivitas Penerapan Sistem E-Performance Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kota Surabaya*. Skripsi. Program S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga. Surabaya.